



The Illusion of Digital Tax Convenience: Analyzing the Cognitive Gap of MSMEs towards the e-NPWP System in Bandar Lampung

Assila Zalfa Asnari^{1*}, Mira Anjani², Zahra Syalavi Tabsa³, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

University of Lampung

Corresponding Author: Assila Zalfa Asnari, assilazalfa@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Understanding, MSMEs, E-NPWP, Digital Taxation, Bandar Lampung City

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Asnari, Anjani, Tabsa, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine the level of understanding of MSME actors regarding e-NPWP in Bandar Lampung City. The background of this study is based on the importance of tax administration for MSMEs and the development of digital tax services, including the emergence of e-NPWP as a form of digital tax identity. This study used a descriptive quantitative approach involving 40 MSME actors selected through purposive sampling. Data were collected through questionnaires distributed via Google Form and analyzed descriptively using frequencies, percentages, and response tendencies. The results show that most respondents had heard of e-NPWP and understood that e-NPWP is the digital form of NPWP and has a function in tax administration. Respondents' understanding of the use of e-NPWP for administrative purposes was also fairly good. However, understanding of how to obtain or access e-NPWP was still low. Information about e-NPWP was considered quite clear by most respondents, but this was not fully followed by practical ability to use the service. This study concludes that the level of understanding of MSME actors regarding e-NPWP in Bandar Lampung City is still not optimal, especially in the technical aspects of access and use

Analisis Dampak Regresif Kebijakan PPN 12% Terhadap Struktur Konsumsi Rumah Tangga Masyarakat Indonesia

Assila Zalfa Asnari^{1*}, Mira Anjani², Zahra Syalavi Tabsa³, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

Universitas Lampung

Corresponding Author: Assila Zalfa Asnari, assilazalfa@gmail.com

ARTICLE INFO

Katakunci: Pemahaman, UMKM, E-NPWP, Perpajakan Digital, Kota Bandar Lampung

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 25, May

©2026 Asnari, Anjani, Tabsa, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP di Kota Bandar Lampung. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya administrasi perpajakan bagi UMKM serta berkembangnya digitalisasi layanan perpajakan, termasuk hadirnya e-NPWP sebagai bentuk identitas perpajakan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 40 pelaku UMKM yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form dan dianalisis secara deskriptif melalui frekuensi, persentase, dan kecenderungan jawaban responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengenal e-NPWP dan memahami bahwa e-NPWP merupakan bentuk digital dari NPWP serta memiliki fungsi dalam administrasi perpajakan. Pemahaman responden terhadap penggunaan e-NPWP untuk keperluan administrasi juga tergolong cukup baik. Namun, pemahaman mengenai cara memperoleh atau mengakses e-NPWP masih rendah. Informasi mengenai e-NPWP dinilai cukup jelas oleh sebagian besar responden, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan praktis dalam menggunakan layanan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP di Kota Bandar Lampung masih belum optimal, terutama pada aspek teknis akses dan penggunaan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi yang sangat penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena keberadaannya tidak hanya menjadi penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Farisi et al. (2022). UMKM juga dipandang sebagai sektor yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, distribusi hasil pembangunan, serta sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Ramadhan et al. (2025) dan Yolanda dan Hasanah (2024). Dalam situasi ekonomi yang bergejolak, UMKM memiliki daya tahan yang relatif baik sehingga keberadaannya kerap menjadi penyangga perekonomian nasional, terutama pada masa krisis (Farisi et al., 2022). Peran tersebut semakin penting karena UMKM tersebar di berbagai wilayah dan dekat dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sehari-hari, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan pada level makro, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal (Yolanda & Hasanah, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar unit usaha berskala kecil, melainkan bagian strategis dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bagi pelaku UMKM, pemahaman terhadap administrasi perpajakan tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha secara lebih tertib. Judijanto dan Al-Amin (2025) menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak pada sektor UMKM kerap dipengaruhi oleh lemahnya literasi perpajakan, proses administrasi yang dianggap rumit, serta keterbatasan akses terhadap edukasi dan pendampingan perpajakan. Dalam kondisi demikian, NPWP memiliki posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai identitas perpajakan resmi yang menjadi dasar bagi pelaku UMKM untuk menjalankan kewajiban pajaknya secara sah (Yuliana et al., 2025). Kepemilikan NPWP juga dapat menunjang akses yang lebih luas terhadap layanan formal, seperti perbankan, pembiayaan, perizinan usaha, hingga program bantuan pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Yuliana et al. (2025). Pada sisi lain, Handayani et al. (2025) menegaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang memandang urusan perpajakan sebagai beban administratif, sehingga pemahaman yang memadai mengenai fungsi administrasi perpajakan dan manfaat NPWP menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi layanan perpajakan merupakan bentuk modernisasi administrasi pajak yang dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, akurat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hajering (2024) menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan berbagai layanan elektronik, seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan DJP Online, untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara daring. Dalam perkembangan tersebut, Setiawan et al. (2023) menunjukkan bahwa layanan pendaftaran NPWP berbasis elektronik memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan tanpa dibatasi

ruang dan waktu. Hadirnya e-NPWP menunjukkan adanya pergeseran identitas perpajakan ke bentuk digital yang lebih praktis dan selaras dengan sistem layanan pajak elektronik, sejalan dengan arah modernisasi administrasi perpajakan yang dibahas oleh Samosir (2025). Bagi pelaku UMKM, perubahan ini dapat memberikan kemudahan administratif dan mempercepat akses terhadap layanan perpajakan. Namun, Samosir (2025) dan Sinuhaji et al. (2024) menegaskan bahwa manfaat digitalisasi tersebut belum tentu dirasakan secara merata karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan literasi digital, pemahaman teknologi, dan gangguan sistem maupun jaringan internet. Oleh karena itu, pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP dan layanan pajak digital menjadi penting untuk dikaji dalam melihat kesiapan mereka menghadapi transformasi administrasi perpajakan.

Pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP masih menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji karena tingkat literasi perpajakan dan literasi digital pada kelompok usaha ini belum merata. Wahang et al. (2025) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakan secara memadai, sedangkan Firnanda dan Aminatuzzuhro (2025) menemukan bahwa pelaku UMKM juga masih terbatas dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Rasmon et al. (2023) menambahkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP dan belum optimal dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut membuat transformasi identitas perpajakan ke bentuk elektronik, seperti e-NPWP, belum sepenuhnya mudah dipahami oleh pelaku usaha. Keterbatasan pengetahuan, minimnya sosialisasi, kurangnya pendampingan, serta kekhawatiran terhadap kerumitan sistem digital menjadi faktor yang dapat menghambat pemahaman mereka, sebagaimana juga ditekankan oleh Yosefina Andia Dekrita et al. (2024). Situasi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap e-NPWP bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan layanan digital, tetapi juga berhubungan dengan kesiapan pelaku UMKM untuk masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan yang lebih formal dan terdigitalisasi.

Kota Bandar Lampung dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas UMKM yang cukup menonjol di Provinsi Lampung. Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di kota ini mengalami fluktuasi selama periode 2020–2023, yakni sebesar 118.533 unit pada tahun 2020 dan 2021, turun menjadi 4.460 unit pada tahun 2022, lalu meningkat kembali menjadi 30.940 unit pada tahun 2023 (BPS Provinsi Lampung, 2024). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung memiliki posisi yang penting dalam perekonomian daerah. Pentingnya posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah juga sejalan dengan pandangan Farisi et al. (2022) serta Yolanda dan Hasanah (2024) yang menempatkan UMKM sebagai sektor strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, Kota Bandar Lampung dipandang relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP, terutama dalam konteks penguatan usaha dan transformasi layanan perpajakan digital.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahang et al. (2025) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaannya terletak pada kajian tentang pemahaman perpajakan pada pelaku UMKM. Perbedaannya, penelitian tersebut meneliti pengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian ini menelaah pemahaman terhadap e-NPWP. Firnanda dan Aminatuzzuhro (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih kurang memahami peraturan perpajakan. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang rendahnya pemahaman perpajakan UMKM. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada tarif UMKM, sedangkan penelitian ini berfokus pada e-NPWP. Setiawan et al. (2023) menjelaskan bahwa layanan e-registration memudahkan pendaftaran NPWP secara daring. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai NPWP dalam layanan perpajakan digital. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas mekanisme layanan, sedangkan penelitian ini membahas tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP. Penelitian terdahulu telah membahas pemahaman perpajakan UMKM, peraturan pajak, dan layanan NPWP berbasis digital. Namun, penelitian yang secara khusus menelaah tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP di Kota Bandar Lampung masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pelaku UMKM memahami fungsi, manfaat, dan penggunaan e-NPWP sebagai bagian dari layanan perpajakan digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam memperkuat sosialisasi dan edukasi perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP di Kota Bandar Lampung berdasarkan data yang diperoleh dari responden. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan karena sesuai untuk menyajikan kondisi objektif di lapangan melalui pengukuran data dalam bentuk angka, kemudian diolah dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman responden terhadap objek yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandar Lampung. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menjalankan usahanya di Kota Bandar Lampung dan bersedia mengisi kuesioner penelitian. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 40 pelaku UMKM.

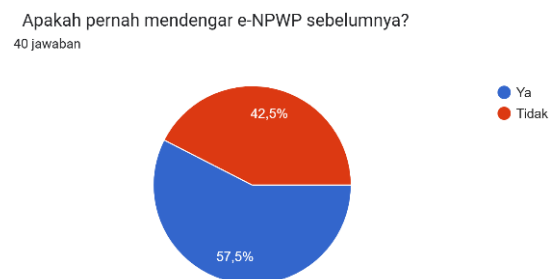
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Instrumen penelitian disusun dalam bentuk pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman pelaku UMKM terhadap e-

NPWP, meliputi pengetahuan tentang pengertian, fungsi, manfaat, dan penggunaan e-NPWP. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert, agar jawaban responden dapat diukur secara lebih sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk mengetahui frekuensi, persentase, dan kecenderungan jawaban responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan uraian naratif untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP di Kota Bandar Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

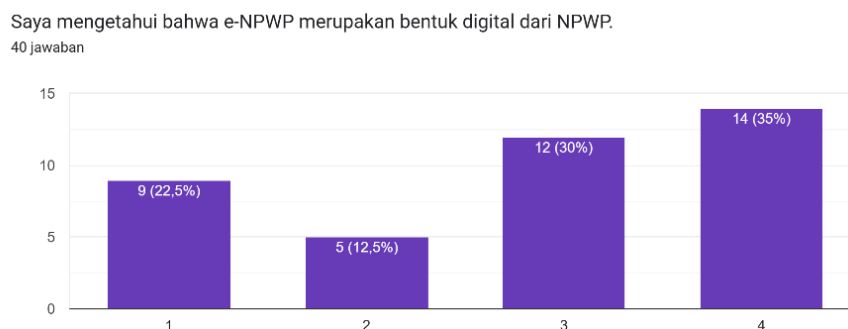
Pengetahuan Awal Pelaku UMKM tentang e-NPWP



Gambar 1. Pengetahuan awal pelaku UMKM tentang e-NPWP

Berdasarkan Gambar 1, dari total 40 responden, sebanyak 57,5% atau sekitar 23 responden menyatakan pernah mendengar e-NPWP sebelumnya, sedangkan 42,5% atau sekitar 17 responden menyatakan belum pernah mendengar e-NPWP. Data ini menunjukkan bahwa informasi mengenai e-NPWP sudah mulai menjangkau sebagian pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung. Persentase responden yang pernah mendengar e-NPWP lebih besar daripada yang belum pernah mendengar, sehingga dapat diartikan bahwa e-NPWP bukan lagi istilah yang sepenuhnya asing bagi responden. Meskipun demikian, selisih antara kedua kelompok tersebut tidak terlalu jauh, sehingga masih terlihat adanya kesenjangan penyebaran informasi di kalangan pelaku UMKM. Keadaan ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai e-NPWP telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya merata dan belum menjangkau seluruh responden secara optimal. Oleh karena itu, tingkat keterpaparan awal pelaku UMKM terhadap e-NPWP sudah cukup baik, tetapi penyebaran informasinya masih perlu diperluas agar lebih merata.

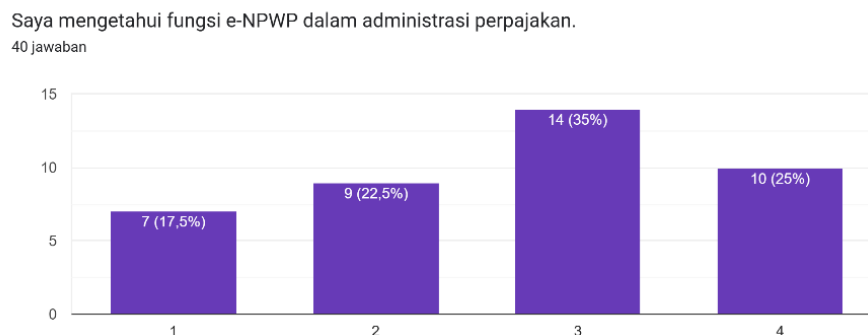
Pemahaman Pelaku UMKM bahwa e-NPWP Merupakan Bentuk Digital dari NPWP



Gambar 2. Pemahaman pelaku UMKM bahwa e-NPWP merupakan bentuk digital dari NPWP

Berdasarkan Gambar 2, dari 40 responden terdapat 14 responden (35%) yang memberikan skor 4, 12 responden (30%) memberikan skor 3, 5 responden (12,5%) memberikan skor 2, dan 9 responden (22,5%) memberikan skor 1. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung berada pada pilihan skor tinggi, yaitu 3 dan 4, dengan jumlah keseluruhan 26 responden (65%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman awal bahwa e-NPWP merupakan bentuk digital dari NPWP. Meskipun demikian, masih terdapat 14 responden (35%) yang berada pada skor rendah, yaitu 1 dan 2, sehingga dapat dilihat bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh responden. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengenalan terhadap konsep dasar e-NPWP sudah cukup baik, tetapi masih terdapat sebagian pelaku UMKM yang belum memahami identitas digital perpajakan tersebut secara benar. Oleh karena itu, sebagian besar pelaku UMKM telah memahami bahwa e-NPWP merupakan bentuk digital dari NPWP, tetapi tingkat pemahaman tersebut masih belum merata pada seluruh responden.

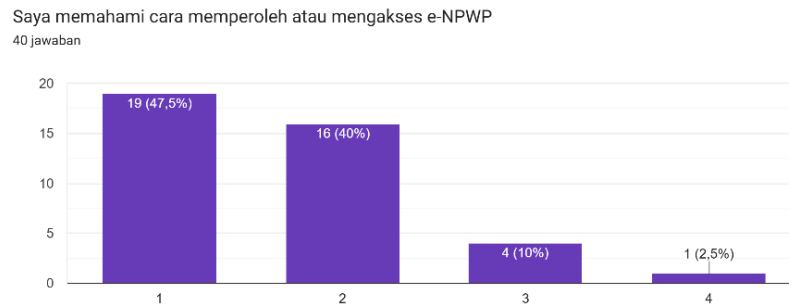
Pemahaman pelaku UMKM tentang fungsi e-NPWP dalam administrasi perpajakan



Gambar 3. Pemahaman pelaku UMKM tentang fungsi e-NPWP dalam administrasi perpajakan

Berdasarkan Gambar 3, dari 40 responden terdapat 10 responden (25%) yang memberikan skor 4, 14 responden (35%) memberikan skor 3, 9 responden (22,5%) memberikan skor 2, dan 7 responden (17,5%) memberikan skor 1. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada skor 3 dan 4, yaitu sebanyak 24 responden (60%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sudah memiliki pemahaman yang cukup mengenai fungsi e-NPWP dalam administrasi perpajakan. Meskipun demikian, masih terdapat 16 responden (40%) yang memberikan skor 1 dan 2, sehingga dapat dilihat bahwa pemahaman responden belum sepenuhnya kuat dan masih terdapat kelompok yang belum memahami fungsi e-NPWP secara baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang fungsi e-NPWP sudah mulai terbentuk, tetapi masih memerlukan penguatan melalui edukasi yang lebih jelas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi e-NPWP dalam administrasi perpajakan tergolong cukup baik, tetapi belum merata pada seluruh responden.

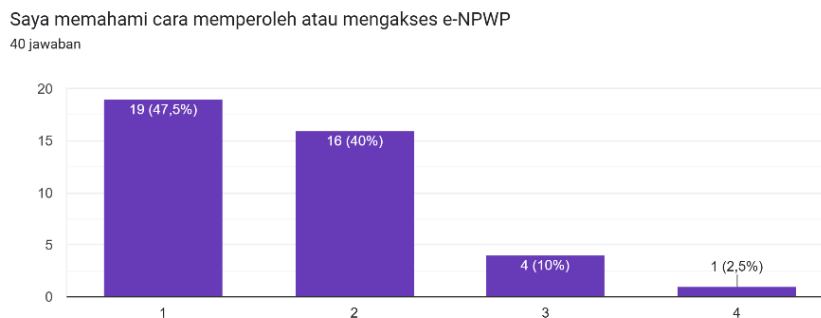
Pemahaman pelaku UMKM tentang cara memperoleh atau mengakses e-NPWP



Gambar 4. Pemahaman pelaku UMKM tentang cara memperoleh atau mengakses e-NPWP

Berdasarkan Gambar 4, sebanyak 1 responden (2,5%) memberikan skor 4, 4 responden (10%) memberikan skor 3, 16 responden (40%) memberikan skor 2, dan 19 responden (47,5%) memberikan skor 1. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada skor rendah, yaitu 1 dan 2, dengan jumlah 35 responden (87,5%). Hasil ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami cara memperoleh atau mengakses e-NPWP. Rendahnya skor pada poin ini menunjukkan bahwa kendala terbesar bukan terletak pada pengenalan istilah e-NPWP, melainkan pada pemahaman teknis mengenai prosedur akses dan penggunaannya. Situasi ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih aplikatif dan mudah dipahami, khususnya yang berkaitan langsung dengan langkah-langkah penggunaan layanan digital perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman pelaku UMKM tentang cara memperoleh atau mengakses e-NPWP masih sangat rendah.

Pemahaman pelaku UMKM tentang cara memperoleh atau mengakses e-NPWP

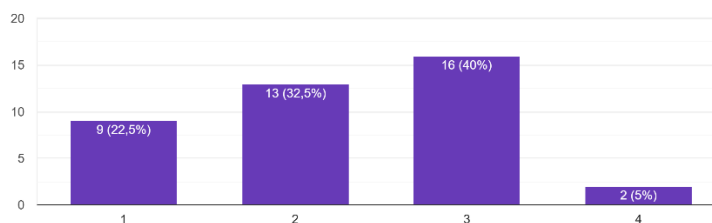


Gambar 5. Pemahaman pelaku UMKM tentang cara memperoleh atau mengakses e-NPWP

Berdasarkan Gambar 5, sebanyak 1 responden (2,5%) memberikan skor 4, 4 responden (10%) memberikan skor 3, 16 responden (40%) memberikan skor 2, dan 19 responden (47,5%) memberikan skor 1. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada skor rendah, yaitu 1 dan 2, dengan jumlah 35 responden (87,5%). Hasil ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami cara memperoleh atau mengakses e-NPWP. Rendahnya skor pada poin ini menunjukkan bahwa kendala terbesar bukan terletak pada pengenalan istilah e-NPWP, melainkan pada pemahaman teknis mengenai prosedur akses dan penggunaannya. Situasi ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih aplikatif dan mudah dipahami, khususnya yang berkaitan langsung dengan langkah-langkah penggunaan layanan digital perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman pelaku UMKM tentang cara memperoleh atau mengakses e-NPWP masih sangat rendah.

Pemahaman pelaku UMKM bahwa e-NPWP dapat memudahkan penyimpanan dan penggunaan data NPWP

Saya memahami bahwa e-NPWP dapat memudahkan pelaku UMKM dalam menyimpan dan menggunakan data NPWP
40 jawaban



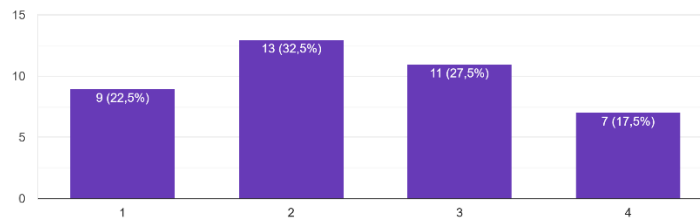
Gambar 6. Pemahaman pelaku UMKM tentang manfaat e-NPWP dalam menyimpan dan menggunakan data NPWP

Berdasarkan Gambar 6, terdapat 2 responden (5%) yang memberikan skor 4, 16 responden (40%) memberikan skor 3, 13 responden (32,5%) memberikan skor 2, dan 9 responden (22,5%) memberikan skor 1. Responden yang memberikan skor 3 dan 4 berjumlah 18 orang (45%), sedangkan responden yang memberikan skor 1 dan 2 berjumlah 22 orang (55%). Data ini menunjukkan

bahwa lebih dari separuh responden belum sepenuhnya memahami bahwa e-NPWP dapat memudahkan penyimpanan dan penggunaan data NPWP. Meskipun terdapat sejumlah responden yang sudah melihat manfaat tersebut, proporsi skor rendah masih lebih besar daripada skor tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa manfaat praktis e-NPWP dalam aspek penyimpanan data belum dipahami secara luas oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, pemahaman pelaku UMKM terhadap manfaat e-NPWP dalam memudahkan penyimpanan dan penggunaan data NPWP masih tergolong rendah.

Penilaian pelaku UMKM terhadap kepraktisan penggunaan e-NPWP dibandingkan bentuk fisik NPWP

Saya menilai penggunaan e-NPWP lebih praktis dibandingkan bentuk fisik NPWP
40 jawaban



Gambar 7. Penilaian pelaku UMKM terhadap kepraktisan e-NPWP dibandingkan NPWP fisik

Berdasarkan Gambar 7, terdapat 7 responden (17,5%) yang memberikan skor 4, 11 responden (27,5%) memberikan skor 3, 13 responden (32,5%) memberikan skor 2, dan 9 responden (22,5%) memberikan skor 1. Jumlah responden yang memberikan skor 1 dan 2 mencapai 22 responden (55%), sedangkan yang memberikan skor 3 dan 4 berjumlah 18 responden (45%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang belum menilai e-NPWP lebih praktis dibandingkan NPWP fisik. Keadaan ini memperlihatkan bahwa bentuk digital belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai pilihan yang lebih mudah dan sederhana oleh pelaku UMKM. Rendahnya penilaian terhadap kepraktisan kemungkinan berkaitan dengan keterbatasan pengalaman penggunaan dan kurangnya pemahaman teknis terhadap layanan digital perpajakan. Oleh karena itu, pelaku UMKM belum sepenuhnya menilai e-NPWP lebih praktis dibandingkan NPWP fisik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP di Kota Bandar Lampung masih berada pada tingkat cukup, tetapi belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar responden telah memiliki pengetahuan awal tentang e-NPWP, yang terlihat dari cukup banyaknya pelaku UMKM yang pernah mendengar istilah e-NPWP dan mengetahui bahwa e-NPWP merupakan bentuk digital dari NPWP. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan e-NPWP sudah mulai dikenal di kalangan pelaku usaha, sehingga dari sisi pengenalan awal, layanan ini tidak lagi sepenuhnya asing bagi responden.

Pemahaman responden terhadap fungsi e-NPWP dalam administrasi perpajakan juga menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Sebagian besar

responden telah memahami bahwa e-NPWP memiliki fungsi dalam administrasi perpajakan dan dapat digunakan sebagaimana NPWP pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual pelaku UMKM sudah mulai memahami kedudukan e-NPWP sebagai identitas perpajakan yang sah. Meskipun demikian, pemahaman tersebut masih lebih kuat pada aspek pengertian dan fungsi umum, serta belum sepenuhnya diikuti oleh penguasaan yang lebih mendalam terhadap penggunaan praktisnya.

Kelemahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini terletak pada aspek teknis, terutama mengenai cara memperoleh atau mengakses e-NPWP. Mayoritas responden masih menunjukkan tingkat pemahaman yang rendah pada bagian ini. Kondisi tersebut menandakan bahwa pelaku UMKM cenderung sudah mengetahui keberadaan e-NPWP, tetapi belum benar-benar memahami langkah-langkah praktis untuk mengakses dan memanfaatkannya. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dasar dan kemampuan penggunaan secara langsung.

Pada sisi lain, informasi mengenai e-NPWP dinilai sudah cukup jelas oleh sebagian besar responden, baik melalui media sosial, internet, maupun sosialisasi resmi. Akan tetapi, kejelasan informasi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong kesiapan pelaku UMKM dalam menggunakan e-NPWP untuk kebutuhan usaha. Hasil ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi saja belum cukup, karena pelaku UMKM juga memerlukan penjelasan yang lebih praktis, sederhana, dan mudah diterapkan. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung sudah mengenal dan cukup memahami e-NPWP pada tingkat dasar, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek akses, penggunaan, dan pemanfaatan praktis dalam kegiatan usaha.

adapun beberapa saran dalam penelitian ini:

1. Sosialisasi mengenai e-NPWP perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan cara memperoleh, mengakses, dan menggunakan e-NPWP secara langsung.
2. Pelaku UMKM juga perlu diberikan pendampingan yang lebih sederhana dan aplikatif agar tidak hanya mengenal e-NPWP, tetapi juga mampu memanfaatkannya dalam kegiatan usaha.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pelaku UMKM terhadap e-NPWP, seperti literasi digital, tingkat pendidikan, dan intensitas sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Farisi, S. A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Firnanda, S., & Aminatuzzuhro. (2025). Analisis pemahaman peraturan pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM di Pasar Desa Pengalangan. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*, 3(3), 132–141.
- Hajering. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan (elektronik system) terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4081–4090.
- Handayani, F., Purnasari, D., Febriani, R., Ismail, M., & Putri, S. N. R. (2025). Literasi dan edukasi pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM di Kartasura. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 26(02), 1–5.
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2025). Kepatuhan pajak dan tata kelola perpajakan bagi UMKM di Indonesia: Kajian pustaka terhadap regulasi, implementasi, dan tantangan. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(6), 447–454.
- Pudjowati, J., Mas'adah, Tri Wahyuni, S., Pudjiastuti, N., & Inayah, N. L. (2023). Pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kreatif asesoris “Cantik” untuk meningkatkan pertumbuhan usaha semasa pandemi pada event Jatim Fair. *Communnity Development Journal*, 4(2), 2519–2524.
- Ramadhan, D. R., Ramadhani, S., & Rambe, R. (2025). UMKM: Definisi, karakteristik, dan kontribusi ekonomi. *EKONOM: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(3).

- Rasmon, Sitinajak, M., Rahayu, E. U., Zubir, & Tinaria, L. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 240–248.
- Rifani, J. (2022). Peranan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Amuntai Kab. HSU (Studi kasus pada UMKM Furniture Kayu Bpk. H. Majid). *Inovatif*, 4(1), 27–34.
- Samosir, H. E. S. (2025). Dampak digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 2171–2179.
- Setiawan, B., Fuadah, L., Maharani, F. G., Pratama, O. T., Jumiati, S., & Kurniawan, I. A. (2023). Penerapan aplikasi pelayanan publik pada pendaftaran NPWP secara e-registration. *Competitive*, 18(1), 1–8.
- Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 6974–6990.
- Wahang, L. K., Baba, N., Nurseptiani, A., Lusiana, E., & Hasanah, A. N. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 509–516.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170–186.
- Yosefina Andia Dekrita, Afrianti, M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C., Plewang, Y. A., Raja, M. Y., Yulianti, M., & Bunga, M. A. V. N. (2024). Pentingnya pengetahuan dan kesadaran pajak bagi UMKM

dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Bangkoor, Kecamatan Talibura. *Communnity Development Journal*, 5(5), 9942-9947.

Yuliana, N., Santi, F., & June, C. G. T. (2025). Peran penting pajak dalam UMKM: Membangun ekonomi inklusif untuk mencapai SDGs. *Jurnal Graha Pengabdian*, 7(1), 40-49.